

# Kajian Kelembagaan Pengelolaan dan Sistem Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Ira Meutia Hanafi<sup>1</sup>

Diterima : 20 Maret 2012

Disetujui : 19 April 2012

## ABSTRACT

*The study examines the performance Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru in the operation of Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru as a Type A terminal. The institutional sistem of Purabaya Terminal in Surabaya acted as a reference for best practice. The analysis included terminal institutional sistem analysis, terminal operation analysis, and terminal system analysis, followed by concluding the factors behind the poor performance of Terminal BRPS. Analysis showed that low human resources quality has lead to poor performance of Dishubkominfo in operating the terminal. It has affected the policy planning and implementation, officer commitment and consistency, and the monitoring and enforcement whenever violations occur. Poor connectivity to the public transport system and low accessibility were identified to cause the poor performance of the terminal.*

**Keywords :** institutional, terminal operation, terminal system

## ABSTRAK

*Studi ini mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru dalam mengelola Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Kota Pekanbaru, sebagai terminal penumpang tipe A. Sistem kelembagaan pengelola Terminal Purabaya Surabaya digunakan sebagai acuan best practice. Tahap analisis mencakup analisis kelembagaan pengelola terminal, analisis pengelolaan terminal, dan analisis sistem terminal, diikuti dengan penyimpulan faktor penyebab rendahnya kinerja Terminal BRPS. Analisis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama penyebab rendahnya kinerja Dishubkominfo dalam mengelola Terminal BRPS. Hal ini berpengaruh dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaannya, komitmen dan konsistensi aparat, serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Buruknya ketersambungan dengan sistem angkutan umum dan rendahnya aksesibilitas menjadi permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya kinerja Terminal BRPS.*

**Kata Kunci :** kelembagaan, pengelolaan terminal, sistem terminal

---

<sup>1</sup> Bappeda Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat  
Kontak Penulis: irameutia@gmail.com

## PENDAHULUAN

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki sebagai salah satu komponen sistem transportasi, untuk mengoptimalkan fungsinya perlu dilakukan pengelolaan oleh sebuah sistem kelembagaan dan juga perlu didukung oleh sistem jaringan yang saling terintegrasi dengan baik. Pengelolaan terminal merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Sebagai lembaga yang berwenang mengelola Terminal Bandara Raya Payung Sekaki saat ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dinilai belum efektif dalam meningkatkan fungsi terminal BRPS. Hal ini terlihat dari belum tercapainya tujuan kelembagaan pengelolaan terminal yaitu meningkatkan fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui UPTD Terminal, berfungsi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa terminal dan juga sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Dalam pelaksanaan dilapangan, target pemenuhan pendapatan asli daerah (PAD), lebih diprioritaskan daripada peningkatan pelayanan, hal ini secara tidak langsung mengesampingkan fungsi utama lembaga pemerintah sebagai pelayan masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa terminal.

Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan UPTD Terminal juga dinilai rendah karena tidak mampu bersikap tegas dalam menangani masalah di bidang perhubungan (Antara Riau News, 23 April 2010). Kelembagaan yang ada menerapkan model deregulasi, yaitu model dimana dalam implementasi penyelenggaraan terminal Pemerintah Kota sebagai pihak pembuat kebijakan (perencana sistem) dan sekaligus sebagai pihak pemberi ijin penyelenggaraannya, tidak tegas dalam melaksanakan pemantauan terhadap operasional terminal serta tidak tegas dalam melaksanakan penertiban di luar terminal. Disamping itu belum terintegrasinya dengan baik antara terminal Bandar Raya Payung Sekaki dengan terminal tipe C yang ada di Kota Pekanbaru yang terlihat dari tidak saling terhubungnya tiap terminal yang ada baik dari ketersediaan jaringan jalan maupun juga ketersediaan jalur angkutan kota menuju terminal BRPS sebagai terminal tipe A. Sehingga mempersulit masyarakat pengguna jasa terminal untuk menuju terminal Bandar Raya Payung Sekaki. Pada akhirnya masyarakat enggan menggunakan terminal. Kondisi ini mempengaruhi tidak optimalnya fungsi terminal BRPS saat ini. Sehingga mengakibatkan muncul permasalahan transportasi perkotaan seperti munculnya terminal bayangan di berbagai titik persimpangan dan terjadinya kemacetan lalu lintas serta memperburuk citra Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi.

Berdasarkan berbagai fenomena permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada upaya mencari jawaban terhadap pertanyaan pokok: *Bagaimanakah kelembagaan pengelola dan sistem terminal terkait Terminal Bandar Raya Payung Sekaki yang menyebabkan belum optimalnya fungsi Terminal Bandar Raya Payung Sekaki?*

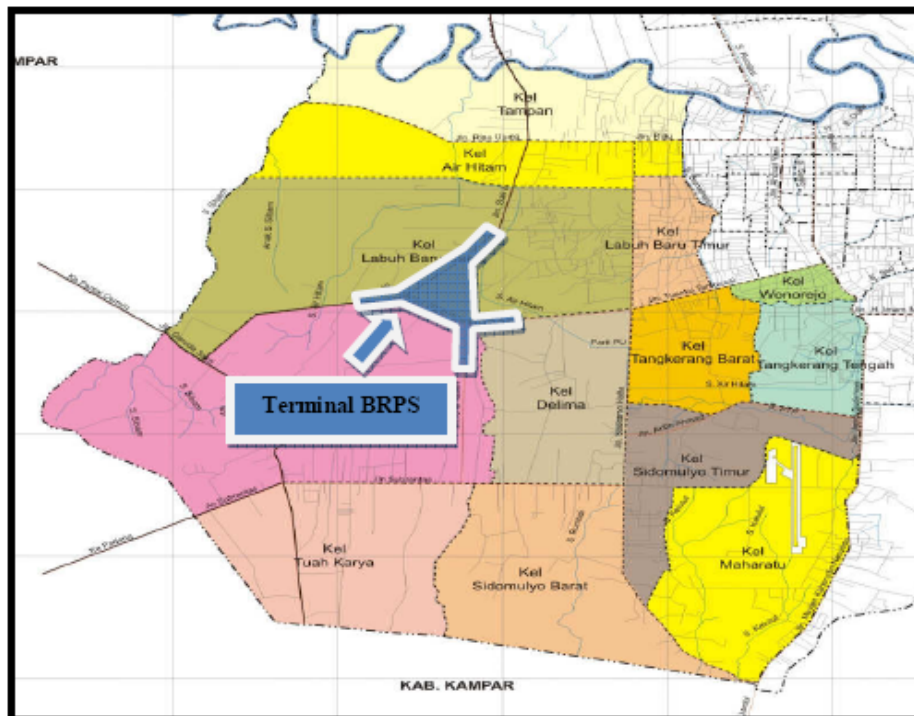
## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *Snowball*. Dalam penelitian tentang kajian kelembagaan pengelolaan terminal ini, informan yang dijadikan sampel adalah tokoh kunci (*key person*) yang berasal dari instansi yang berhubungan dengan pengelolaan terminal. Terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi

umum dan operator penyedia jasa transportasi umum juga dilakukan wawancara yang bertujuan menggali informasi tentang alasan mereka tidak mau memanfaatkan terminal sebagaimana fungsinya. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan komparasi studi. Analisis deskriptif digunakan untuk mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti dan ditafsirkan, serta menyusun dan menyajikannya menjadi informasi yang akurat. Analisis komparasi studi adalah analisis yang dilakukan dengan mengkomparasikan kondisi wilayah studi dengan *best practice* pengelolaan terminal di kawasan lain.

### GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. Lokasi Terminal BRPS Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini:



Sumber : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, 2008

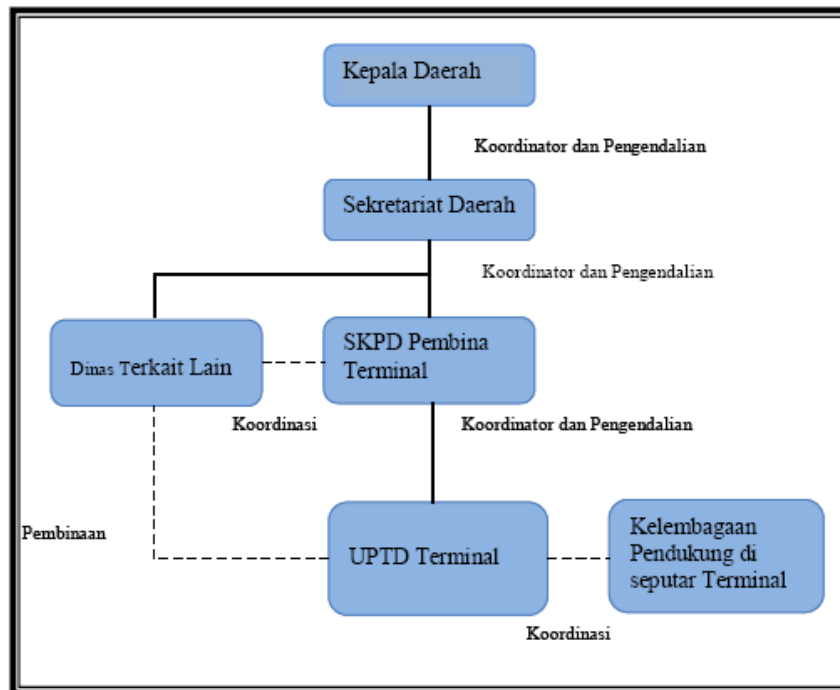
**GAMBAR 1**  
**LOKASI TERMINAL BRPS DALAM WILAYAH PENGEMBANGAN V KOTA PEKANBARU**

### KAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAN SISTEM TERMINAL

Kelembagaan didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap aspek apa dan bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing aspek yang dilaksanakan (Kelompok Keahlian Rekayasa Transportasi ITB, 1997). Kelembagaan memiliki pengaruh yang penting dalam suatu sistem baik dalam pemerintahan maupun dalam

masyarakat. Hal itu dikarenakan kelembagaan sebagai sebuah peraturan akan dapat mengurangi sebuah ketidakpastian dengan terbangunnya sebuah sistem yang kokoh bagi interaksi antar manusia (North, 1990). Oleh karena itu, kelembagaan harus dikelola dengan pendekatan kesisteman. Implikasinya pelaksanaan koordinasi antar bagian didalamnya akan lebih mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja (Siagian, 1999).

Terminal agar dapat berfungsi secara optimal, perlu pengelolaan yang baik. Untuk itu perlu suatu kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan agar terminal lebih terarah. Untuk lebih jelasnya bagaimana kelembagaan pengelolaan terminal dan struktur organisasi unit pengelola terminal dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:



Sumber : Pedoman Umum Pengelolaan Terminal, 2011

**GAMBAR 2**  
**STRUKTUR KELEMBAGAAN TERMINAL YANG DIKELOLA SKPD**

Fungsi terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum yaitu tempat untuk naik turun penumpang atau bongkar muat barang untuk pengendalian lalu lintas dan angkutan kendaraan umum, serta sebagai tempat pemberhentian intra atau antar moda transportasi. Pemilihan lokasi terminal harus dapat memenuhi beberapa ketentuan yaitu mempunyai akses ke dalam jaringan lintas cepat, terkait di dalam sistem transit lokal, keterpusatan terhadap lokasi penumpang potensial, ketersediaan lahan parkir (Creighton, 1976). Sedangkan menurut Vuchie (1981) terminal haruslah terletak pada lokasi yang dapat dicapai secara cepat dari jalan arteri atau jalan utama kota. Hal tersebut menuntut angkutan kota harus dapat mencapai terminal secara langsung dengan aman, cepat dan murah.

## ANALISIS PENGELOLAAN DAN SISTEM TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

### **Analisis Pengelolaan Terminal Bandar Raya Payung Sekaki**

Pengelolaan terminal merupakan upaya yang dilakukan UPTD Terminal dalam rangka pelaksanaan operasional terminal. Pengelolaan terminal penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional terminal. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki agar dapat berfungsi secara optimal tentunya memerlukan pengelolaan yang baik. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan terminal yang dilaksanakan oleh UPTD Terminal dilakukan dengan cara membandingkan kondisi eksisting pengelolaan terminal dengan persyaratan pengelolaan terminal yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 2005.

Secara teknis, kegiatan perencanaan operasional terminal sudah dilaksanakan oleh UPTD Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dengan baik sesuai dengan aturan tersebut di atas. Dimana setiap tahap perencanaan tersebut telah didukung dengan layout dan perhitungan yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik. Namun untuk saat ini, perencanaan operasional yang telah dilakukan, belum mampu membuat terminal berfungsi secara optimal. Perencanaan yang baik, jika tidak didukung dengan pelaksanaan yang baik, hasil yang dicapai juga tidak akan baik. Sehingga dalam pengelolaan terminal, diperlukan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaannya.

Pelaksanaan operasional yang dijalankan oleh UPTD Terminal BRPS sudah sesuai dengan aturan tersebut di atas. Namun berdasarkan hasil pengamatan, dari beberapa kegiatan pelaksanaan operasional terminal yang disyaratkan, ada beberapa kegiatan pelaksanaan operasional yang tidak terlaksana dengan baik, seperti pelaksanaan pengaturan kedatangan dan keberangkatan menurut jadwal. Jadwal kedatangan dan keberangkatan tergantung dari operator bus. Tampak pada Gambar 3 meja informasi tempat petugas pelaksana pengaturan kedatangan dan keberangkatan tidak difungsikan, sehingga pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang juga tidak dilaksanakan. Begitu juga dengan pengaturan lalu lintas di daerah pengawasan terminal, juga tidak dilaksanakan dengan baik, seperti yang terlihat pada Gambar 4 terlihat jalur keberangkatan dan kedatangan Trans Metro juga dilalui oleh kendaraan umum AKDP.



Sumber : Hasil Observasi Penulis, 2011

**GAMBAR 3**  
**RUANG PENGATURAN KEBERANGKATAN DAN KEDANTANGAN YANG TIDAK DIFUNGSIKAN**



Sumber : Hasil Observasi Penulis, 2011

#### GAMBAR 4 PENGUNAAN JALUR TRANS METRO DAN AKDP YANG TIDAK TERATUR

UPTD Terminal telah melaksanakan kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana yang disyaratkan dalam aturan tersebut. Namun pengawasan yang dilakukan masih sangat lemah dan tidak ada ketegasan dari UPTD Terminal dalam melakukan pengawasan tersebut. Sehingga para penyedia jasa bisa berbuat sesuka hati dalam mengoperasikan angkutannya. Pengawasan terminal ini akan berhasil jika diikuti oleh penindakan terhadap pelanggaran dan juga melakukan kordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian untuk menindak berbagai pelanggaran seperti yang ditemukan di Terminal AKAP BRPS yang pelanggarannya dilakukan baik oleh penumpang, pengemudi maupun penyedia jasa angkutan, namun semua hal itu akan berjalan baik jika secara lembaga, UPTD Terminal telah melaksanakan pengelolaan terminal secara baik.

Berdasarkan keseluruhan uraian tentang pengelolaan terminal, dapat disimpulkan bahwa, UPTD Terminal telah melaksanakan pengelolaan terminal sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No.31 tahun 1995. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak tidak terlaksana sesuai dengan tahap perencanaan. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam hal keahlian, keterampilan dan tingkat pendidikan yang dimiliki, rasa tanggung jawab yang rendah terhadap pelaksanaan tugas masing-masing serta komitmen yang rendah untuk mampu bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Disamping itu pengelola terminal dalam hal ini UPTD Terminal, juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan operasional terminal, terutama pelibatan masyarakat sebagai pengguna jasa terminal dalam pelaksanaan operasional terminal. Masyarakat dapat dilibatkan sebagai pemberi masukan/pertimbangan kepada UPTD Terminal dan sebagai fungsi kontrol/ aspirasi masyarakat agar tercapai tujuan yang diharapkan yaitu berfungsinya terminal secara optimal.

#### **Analisis Sistem Terminal**

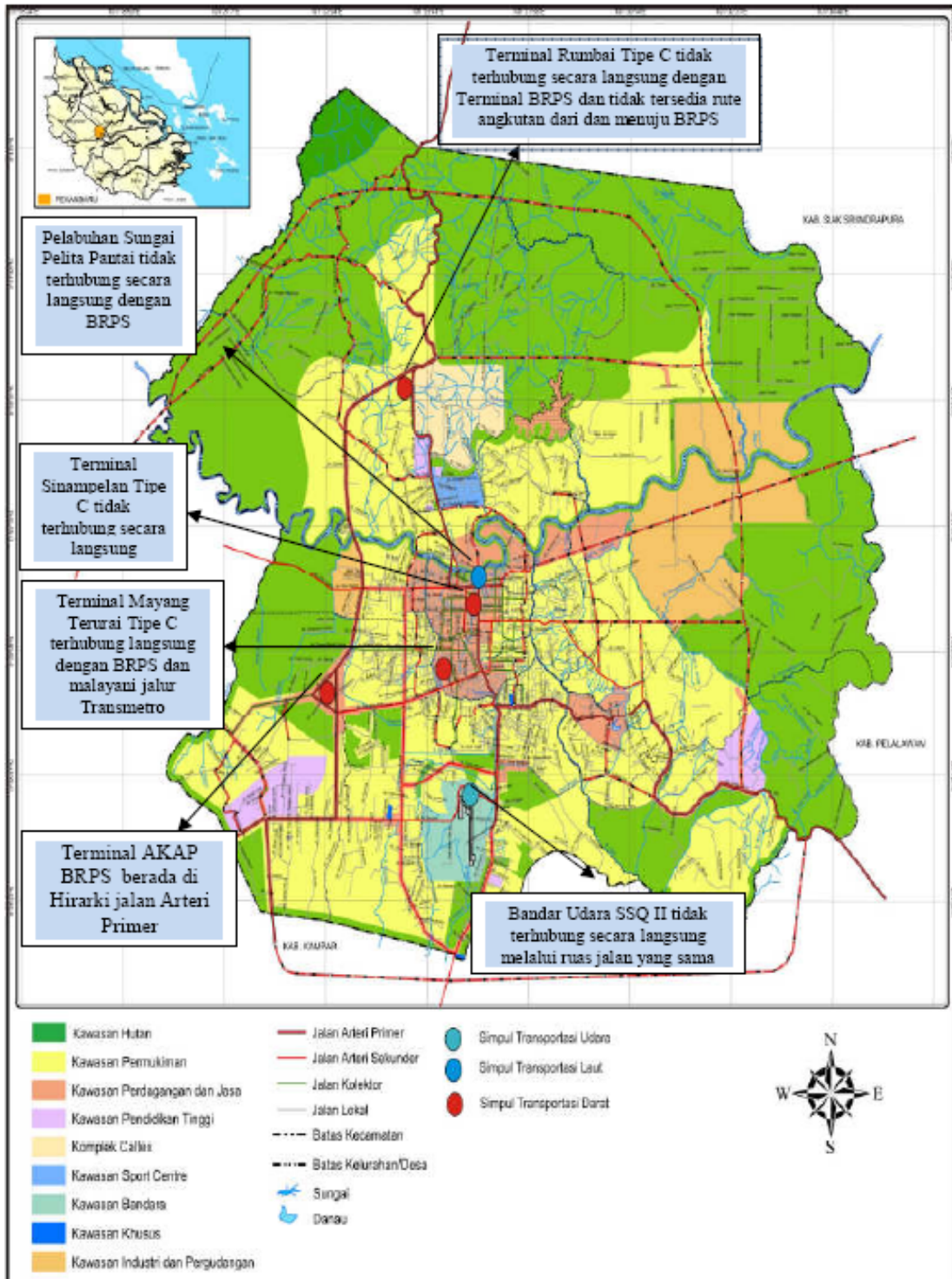
Pemilihan lokasi terminal BRPS sudah sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 1995. Namun belum didukung dengan keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Kondisi menyebabkan aksesibilitas menuju terminal menjadi rendah. Sehingga masyarakat pengguna jasa terminal enggan menuju lokasi terminal BRPS karena tidak adanya moda transportasi yang menghubungkan terminal BRPS dengan pusat-pusat aktivitas masyarakat. Dengan begitu, masyarakat lebih memilih tempat untuk naik dan turun bus, pada titik-titik persimpangan yang dilalui angkutan kota.

Elemen jaringan transportasi terdiri atas *node* dan *link*, dimana *node* merupakan simpul dan *link* adalah ruas. Simpul dalam hal ini merupakan terminal dan ruas adalah jaringan jalan. Kedua elemen ini akan membentuk pola jaringan transportasi perkotaan. Jaringan transportasi ini juga yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan penentuan rute trayek angkutan kota. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki sebagai terminal Tipe A dihubungkan dengan terminal tipe C Mayang Terurai, terminal Senapelan dan Rumbai, serta prasarana transportasi lainnya seperti bandara dan pelabuhan yang ada di Kota Pekanbaru melalui jaringan jalan. Terminal BRPS merupakan simpul beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bagaimana keberadaan terminal BRPS terhubung dengan terminal tipe C Mayang Terurai melalui jaringan jalan pada satu ruas yang sama. Namun tidak terhubung secara langsung dengan terminal tipe C Senapelan dan terminal tipe C Rumbai serta bandara dan pelabuhan karena tidak berada pada satu ruas jalan yang sama dan hirarki jalan yang berbeda.

Ketidakterkaitan Terminal BRPS dengan simpul transportasi lainnya tidak mampu mewujudkan sistem transportasi Kota Pekanbaru yang efektif dan efisien. Sebagai ibukota provinsi, yang menjadi tujuan dari berbagai kota di dalam Provinsi Riau dan beberapa kota dari provinsi tetangga, saat ini Kota Pekanbaru baru memiliki satu terminal penumpang tipe A yaitu terminal BRPS, dan 3 terminal tipe C yang melayani angkutan perkotaan. Kota Pekanbaru seharusnya harus memiliki 3 (tiga) buah terminal tipe B yang melayani skala pelayanannya lebih kecil dari terminal tipe A yang ada. Di bagian Barat Kota Pekanbaru telah ada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki, sebaiknya di bagian Timur seperti di daerah Tenayan Raya dan di Selatan di Wilayah Rumbai terdapat juga terminal angkutan penumpang, sehingga seluruh bagian Kota Pekanbaru terlayani oleh angkutan umum. Terminal Angkutan Umum ini akan berfungsi sebagai gerbang kedatangan di Kota Pekanbaru, seperti seluruh kendaraan umum yang menuju ke Timur ( Pelalawan, Air Molek, Rengat dll ) dipusatkan di Terminal Tenayan Raya ini sehingga tidak lagi ditemukan banyaknya angkutan menuju Timur mencari penumpang di sepanjang Jl. Harapan Raya, begitu juga untuk angkutan umum yang menuju Duri, Dumai, Bagan Siapi-api dan sebagainya dipusatkan di Terminal Rumbai. Terminal BRPS sendiri nantinya selain melayani angkutan antar kota dalam provinsi juga melayani angkutan antar kota antar antar provinsi. Tentunya didukung dengan aksesibilitas yang tinggi dari dan ke terminal ini.

Tidak terkaitnya secara langsung terminal BRPS dengan simpul transportasi lainnya melalui jaringan jalan yang ada, juga terjadi pada rute trayek angkutan umum yang melalui jaringan jalan Kota Pekanbaru. Rute trayek angkutan kota yang ada tidak menghubungkan terminal BRPS dengan simpul transportasi lainnya. Seperti yang terlihat pada Gambar 6 di bawah ini :

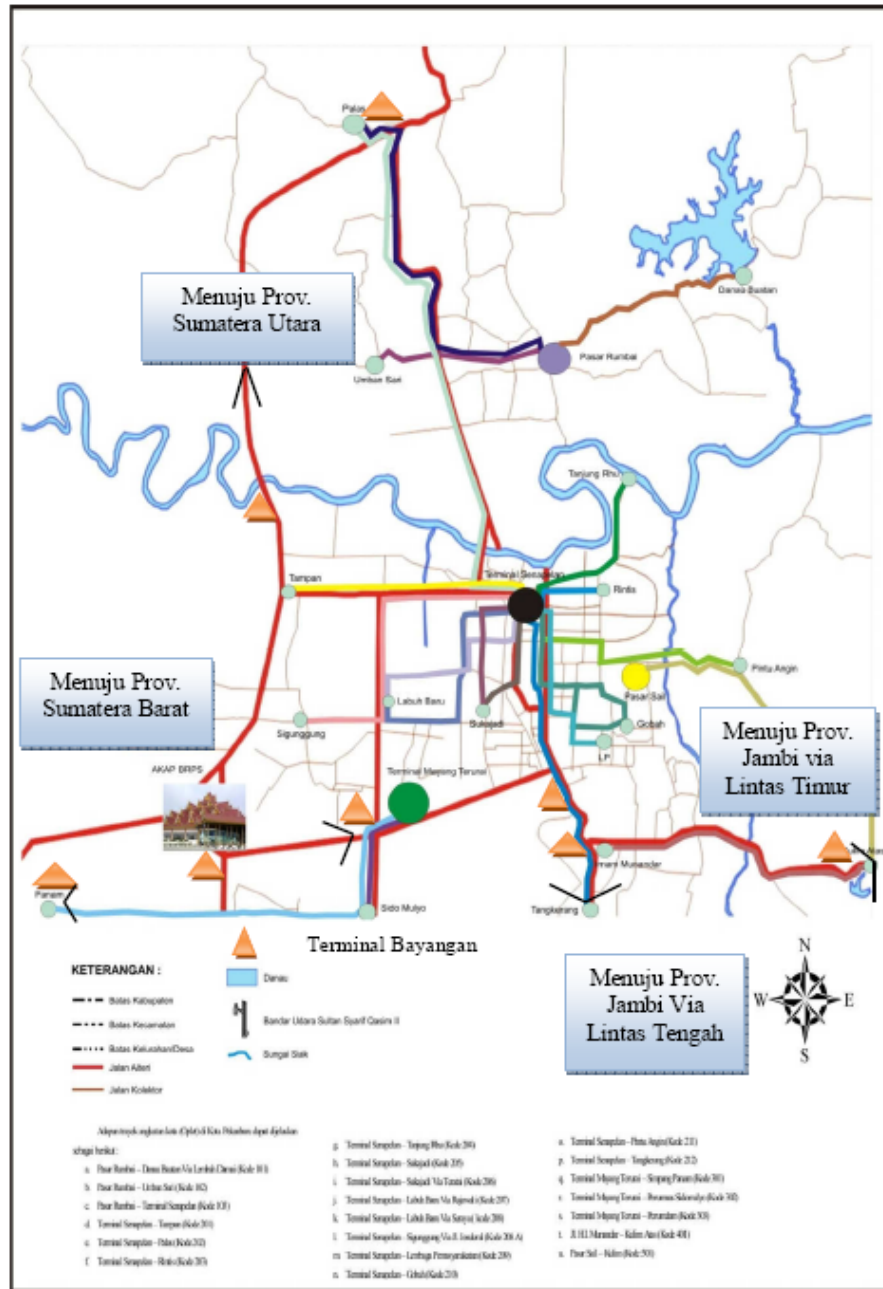




Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2012

**GAMBAR 5**  
**KETERKAITAN TERMINAL SEBAGAI SIMPUL JARINGAN**





Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2012

**GAMBAR 6**  
**TERMINAL BAYANGAN DI KOTA PEKANBARU**

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa rute angkutan yang ada di Kota Pekanbaru, belum melayani ke terminal BRPS. Rute yang ada saat ini baru melayani hubungan antar terminal tipe C Mayang Terurai, Senapelan, dan Rumbai. Tidak terlayannya terminal BRPS oleh rute angkutan kota, menjadi penyebab pengguna jasa terminal enggan menuju terminal BRPS untuk naik dan turun angkutan umum. Masyarakat lebih memilih titik-titik atau persimpangan yang dilalui angkutan kota untuk naik dan turun angkutan umum. Kondisi ini menyebabkan munculnya permasalahan perkotaan seperti munculnya terminal bayangan pada beberapa titik dan persimpangan, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Penetapan rute trayek angkutan kota merupakan tugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Penetapan rute angkutan seharusnya memperhatikan aktivitas yang ada pada suatu kawasan serta pergerakan yang terjadi dalam suatu kawasan. Kesalahan dalam pengaturan rute trayek angkutan kota secara tidak langsung ikut mempengaruhi tidak berfungsinya terminal BRPS sebagaimana mestinya. Karena sebagaimana salah satu persyaratan yang disebutkan dalam Kepmenhub No.31 tahun 1995, bahwa keberadaan sebuah terminal perlu didukung melalui keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda. Salah satunya yaitu ketersediaan angkutan kota. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belum terkainya terminal BRPS dengan simpul transportasi lainnya baik dari jaringan jalan maupun rute trayek angkutan umum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tidak berfungsinya terminal BRPS secara optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kelembagaan pengelolaan dan sistem terminal Bandar Raya Payung Sekaki, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola terminal masih rendah. Hal itu dapat dilihat pada tingkat pendidikan personil yang 90% masih setingkat SMU atau sederajat serta minimnya kegiatan pelatihan dan pendidikan keprofesionalan serta rendahnya komitmen dan konsistensi personil dalam pengelolaan terminal.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru telah memberikan dukungan seperti mengeluarkan peraturan yang mendukung pengelolaan terminal. Namun masih rendahnya anggaran operasional khususnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan langsung, penindakan, sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan masih kurang, umumnya anggaran yang ada hanya digunakan untuk kegiatan administrasi. Sehingga pengelolaan belum berjalan dengan optimal. Dalam teori pengelolaan terminal yang optimal, dukungan dari pemerintah seperti dukungan dalam penegakan aturan, pengaturan retribusi dan penyediaan anggaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan terminal yang optimal.
3. Perkembangan manajemen dan sistem informasi terminal belum memadai dimana secara struktur organisasi belum adanya jabatan fungsional khususnya dalam hal melakukan pengawasan dan penindakan jika terjadi pelanggaran. UPTD Terminal belum mempunyai visi misi yang jelas dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Kekurangannya fasilitas informasi seperti papan digital pengaturan jadwal kedatangan dan keberangkatan, belum adanya *web site* terminal BRPS.
4. Ketersediaan fasilitas tersedia telah sesuai dengan standar kelengkapan yang berlaku namun berapa fasilitas berada pada kondisi rusak dan memiliki daya tampung yang tidak sesuai. Hal ini dapat dilihat pada sempitnya lahan parkir dan istirahat armada bus AKAP, disamping itu juga masih sering ditemui pemanfaatan lahan parkir yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Sistem terminal BRPS belum terkoneksi dengan baik dilihat berdasarkan keterkaitan jaringan jalan dan ketersediaan angkutan kota. Secara makro jaringan jalan harus dapat melayani transportasi yang cepat dan langsung, sedangkan jaringan jalan yang ada menuju terminal BRPS belum mampu melayani transportasi yang cepat dan langsung. Disamping itu belum didukung dengan adanya rute trayek angkutan kota yang menuju terminal BRPS, untuk saat ini hanya dilayani oleh transmetro jurusan Kulim – BRPS dari arah timur Kota Pekanbaru.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Black, John. 1981. *Urban Transport Planning : Theory and Practice*. London: Croom Helm Ltd.
- Creighton, RL. 1976. *Transportation Planning, Theory, and Practice*. London: Croom Helm.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Menteri Perhubungan No 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.
- Khisty, C. J. dan Lall, B. K. 2005. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Miro, Fidel. 1997. *Sistem Transportasi Kota : Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- North, C Douglass. 1990. *Institution, Institutional Change and Economic Performance*.
- Siagian, P. Sondang, 1999. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simpson, Barry J. 1994. *Urban Public Transport Today*. London: Florencetype Ltd.
- Sukarto, Haryono. 2003. *Sistem Transportasi*. Jakarta: Penerbit PT. Mediatama Saptakarya.
- Tumewu, Willy. 1997. "Arah Pengembangan Transportasi Perkotaan di Indonesia". *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.8, No.3, Juli 1997.
- Vuchie, Vulkan.R. 1981. *Urban Public Transportation : System and Technology*. New Jersey: Prentice Hall Inc.